BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisikan mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis mengenai topik penelitian ini yang membahas mengenai sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.1 Sistem Pengendalian Intern

2.1.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Menurut Murtanto (2005:2) mengemukakan bahwa pengendalian intern yaitu :

> "Pengendalian internal secara luas didefinisikan sebagai proses, dipengaruhi oleh dewan direktur, manajemen, dan personil lain sebagai entitas, dirancang untuk memberi jaminan yang masuk akal tentang pencapain tujuan dalam kategori Efektivitas dan efisiensi operasi, Kehandalan laporan keuangan, Kepatuhan pada hukum dan regulasi yang berlaku".

Sedangkan Menurut Hery (2013:159) pengertian pengendalian intern adalah sebagai berikut :

> "Pengendalian Intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan".

Dan menurut Mahmudi (2011:252) mengemukakan bahwa pengertian sistem pengendalian internal sebagai berikut:

> "Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang dilakukan bukan hanya bersifat insidental dan responsive atas kasus tertentu saja tetapi bersifat terus menerus".

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pengendalian intern adalah suatu kebijakan dan prosedur yang dirancang, serta proses yang integral pada tindakan dan kegiatan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

2.1.1.2 Unsur Sistem Pengendalian Intern

Indra Bastian (2010:130), Unsur pokok pengendalian intern tersebut disjikan secara rinci terdapat empat dari setiap unsur pokok sistem pengendalian intern tersebut.

1 Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional secara Tegas.

2 Sistem Wewenangdan Prosedur Pencatatan yang Memberikan Perlindungan yang Cukup terhadap Aset, Utang, Pendapatan, dan Beban

3 Praktik yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Setiap Unit Organisasi

4 Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya.

2.1.1.3 Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Adapun tujuan dari sistem pengendalian intern menurut Nurmalia, dkk (2016:131) sebagai berikut:

1. Untuk melindungi asset (termasuk data) negara.
2. Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat.
3. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal.
4. Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)
5. Untuk efisiensi dan efektivitas operasi.
6. Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku.

2.1.1.4 Indikator Pengendalian Intern

Menurut Murtanto (2005:26), terdapat lima komponen di dalam pengendalian internal, yaitu:

1) Lingkungan pengendalian
2) Penilaian resiko
3) Kegiatan pengendalian
4) Informasi dan komunikasi
5) Pemantauan

Adapun Penjelasan Indikator Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

a) Penegakan integritas dan nilai etika.

b) Komitmen terhadap kompetensi.

c) Kepemimpinan yang kondusif.

d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

e) Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat.

f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.

h) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian resiko

a) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.

b) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1) Identifikasi risiko.

2) Analisis risiko.

c) Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan instansi peemrintah menetapkan:

1) Tujuan instansi pemerintah.

2) Tujuan pada tingkatan kegiatan.

3. Kegiatan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggara kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memilki karakteristik sebagai berikut:

1. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah.
2. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
3. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah.
4. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.
5. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis.
6. Kegiatan pengendalian dievaliasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4. Informasi dan komunikasi

Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:

a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
b) Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus-menerus.

5. Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervise, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

2.1.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.1.2.1 Pengertian Teknologi Informasi

Menurut Turban, *et.al.(*2005:19) menyatakan bahwa Teknologi Informasi sebagai berikut:

> "aspek teknologi dari Sistem Informasi, meliputi *hardware, software, database,* jaringan *(network)"*.

Sedangkan menurut Y.Maryono dan B.Patmi Istiana (2006:3) pengertian teknologi informasi adalah sebagai berikut :

> "Teknologi informasi adalah tata cara atau sistem yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan atau informasi. Pengertian Teknologi informasi dan komunikasi dapat diartikan sebagai pemanfaatan perangkat komputer sebagai alat untuk memproses, menyajikan, serta mengelola data dan informasi dengan berbasis pada peralatan komunikasi"

Dan menurut Edy Irwansyah dan Jurike V. Moniaga (2014:V) pengertian teknologi informasi adalah sebagai berikut :

> "Teknologi Informasi atau Information technology adalah pengertian umum untuk berbagai jenis teknologi tersedia yang tujuan membantu manusia untuk menjalani hidup dengan lebih mudah dan lebih baik dalam membuat, mengubah, menyimpan,

> mengkomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. Di sini teknologi komunikasi digunakan sebagai alat penyaluran informasinya, sedangkan informasinya diolah dan disimpan dalam komputer"

2.1.2.2 Tujuan Teknologi Informasi

Tujuan teknologi informasi yang efektif dan efisien merupakan hal yang menjadi tujuan utama dalam teknologi informasi. Teknologi informasi semacam komputer merupakan sumber dari informasi yang selalu diakses oleh manusia serta semacam perusahaan atau instansi pemerintahan. Teknologi informasi dapat dibilang efektif dan efisien sebab teknologi informasi dapat diakses dengan mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama.

Teknologi informasi dipakai dalam sistem informasi akuntansi untuk menyediakan informasi bagi para pemakai dalam rangka pengambilan keputusan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas informasi keuangan adalah teknologi informasi. Teknologi informasi sangat berpengaruh dalam menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas. Hal ini didukung oleh pernyataan Noviari (2009, 12) yang mengatakan bahwa kemajuan TI mempengaruhi perkembangan SIA dalam hal pemrosesan data, pengendalian intern, dan peningkatan jumlah dan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan.

2.1.2.3 Indikator Teknologi Informasi

Komponen teknologi informasi merupakan subsistem yang terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Menurut Turban, *et al* (2005) bahwa komponen teknologi informasi terdiri dari:

1 Perangkat keras *(Hardware)*
2 Perangkat lunak *(Software)*
3 Basis Data *(database)*
4 Jaringan Komunikasi

Adapun Penjelasan Indikator Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut:

1. Perangkat keras *(Hardware)*

   Merupakan perangkat fisik yang membangun sebuah teknologi informasi (seesar, 2010: 6). Turban, *et al* (2005) mengatakan hardware adalah adalah serangkaian peralatan seperti prosesor, monitor, keyboard, dan printer. Bersama-sama berbagai peralatan tersebut menerima data informasi, memprosesnya dan menampilkannya. Sementara menurut O'Brian (2005) hardware, meliputi semua peralatan dan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi. Sumber daya ini tidak terbatas pada mesin seperti komputer atau perlengkapan lainnya, tetapi juga semua media tempat pencatatan data.

2. Perangkat lunak *(Software)*

   Merupakan sekumpulan program yang memungkinkan piranti keras untuk memproses data. Seesar (2010) mengatakan software merupakan program yang dibuat untuk keperluan khusus yang tersusun atas program yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh komputer.

3. Basis Data *(database)*

   Turban, *et al* (2005) mengatakan bahwa database adalah sekumpulan arsip (file), tabel, relasi, dan lain-lainnya yang saling berkaitan dan menyimpan data serta berbagai hubungan di antaranya. Meliputi pengelolaan data yang

efektif agar dapat memberi informasi bermanfaat bagi para pemakai akhir dalam sebuah organisasi O'Brian (2005).

5. Jaringan Komunikasi

O'Brian (2005) Sumber daya jaringan, yaitu jaringan telekomunikasi yang terdiri dari komputer, pemroses komunikasi, dan peralatan lainnya yang dihubungkan satu sama lain melalui media komunikasi serta dikendalikan melalui software komunikasi. Sementara Turban (2005) Mengatakan sistem koneksi atau jaringan (dengan kabel atau nirkabel) yang memungkinkan adanya pembagian sumber daya antar komputer yang berbeda".

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Adapun pengertian kualitas dan laporan keuangan yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Sedangkan menurut Erlina Rasdianto (2013:21) mengemukakan bahwa:

> "Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya".

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:1), mengemukakan bahwa :

> "Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas, yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi".

Sementara menurut Mahmudi (2011:143) mengemukakan bahwa:

> "Laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan".

Sedangkan menurut Sofyan Syafri Harahap (2009:146) kualitas laporan keuangan dapat didefnisikan sebagai berikut :

> "Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan".

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah proses akuntansi yang terstruktur dalam suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak.

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Secara umum, tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermamfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara khusus, tujuan

laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakannya, dengan:

1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah.
2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah.
3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran.
5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintahan daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.1.3.3 Indikator Laporan Keuangan

Menurut Erlina Rasdianto (2013:8) dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengemukakan bahwa:

> "Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya".

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1) Relevan
2) Andal
3) Dapat dibandingkan
4) Dapat dipahami

Adapun penjelasan indikator laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

1) Relevan.

Laporan keuangan bisadikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan penggunadengan membantu mereka mengevaluasiperistiwa masa lalu atau masa kini, danmemprediksi masa depan, sertamenegaskan atau mengoreksi hasilevaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuanganyang relevan dapat dihubungkan denganmaksud penggunaannya. Informasi yang relevan, yaitu:

a) Memiliki manfaat umpan balik*(feedback value).*

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b) Memiliki manfaat prediktif*(predictive value).*

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akandatang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat waktu.

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap.

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Andal.

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:

a) Penyajian jujur.

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat diverifikasi *(verifiability).*

Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas.

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tetentu.

3) Dapat dibandingkan.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengendalian intern menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat. info akuntansi perusahaan tersebut akan dapat relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pengendalian intern dalam menjamin kualitas laporan keuangan.

Menurut Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, dkk (2014) menyimpulkan bahwa pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan :

> Sistem pengendalian internal memiliki pengaruh sebesar 69,90% terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal yang baik, maka kualitas laporan pemerintah akan semakin membaik. Semakin tinggi tingkat penerapan sistem pengendalian internal maka akan semakin tinggi tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu pula sebaliknya Semakin rendah tingkat penerapan sistem pengendalian internal maka akan semakin rendah tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.2.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Keuangan

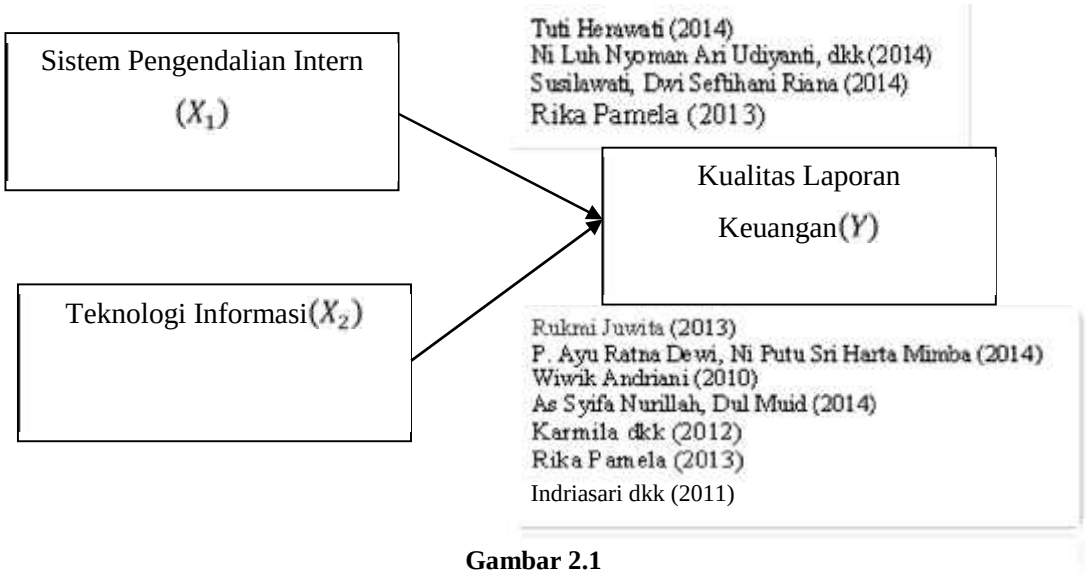
Menurut As Syifa Nurillah, (2014) menyimpulkan pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

> Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin tinggi. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi dalam suatu organisasi, bagi pemerintah daerah yang harus mengelola APBD dimana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks.

> Penelitian Indriasari dkk (2011) menunjukkan bahwa :
> "Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi dalam suatu organisasi, termasuk pemerintah daerah yang harus mengelola APBD dimana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks".

Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan paradigma penelitian sebagi berikut :



Gambar 2.1
Gambar Paradigma Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2009:93) adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan"

Dari kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengemukakan suatu hipotesis sebagai berikut:

H_1: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

H_2: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.